

KAJIAN MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN PSO BIDANG PERS OLEH LKBN ANTARA

Primayanti

LKBN Antara

primajongrang@gmail.com

Abstract: *Based on Government Regulation No. 40 Year 2007 on Perum ANTARA do fund public services (public service obligation / PSO) in the field of government information. ANTARA position is also very strategic in the middle of the fight-laden media industry interests. Also, the need to get in the news media with the retail product line strategy while maintaining the main products for the media. Results of this study showed that the press area of public service obligations (PSO-Field Press) includes a number of products and services that news text, photo news, and TV news. In line with government policies and programs, also set a number of themes that frame the products and services fields PSO Press.*

PSO and Field Releases can be interpreted as the government's efforts to maintain control and domination of the media life, given the strategic function of political economy of media. A contradiction was born. On the one hand, the government wants to adopt the principles of the liberal press, on the other hand maintain government policies in the media sector as opposed to the spirit of libertarianism.

Keyword: Production Manajement, News

Abstrak: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perum LKBN ANTARA dilakukan dana pelayanan umum (*public service obligation/PSO*) di bidang informasi dari pemerintah. Posisi LKBN ANTARA juga sangat strategis di tengah pertarungan industri media yang sarat kepentingan. Juga, perlunya kantor berita masuk media ritel dengan strategi lini produk dengan tetap mempertahankan produk utama untuk media.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pelayanan umum bidang pers (PSO-Bidang Pers) tersebut mencakup sejumlah produk dan layanan yaitu berita teks, berita foto, dan berita TV. Agar sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah, ditetapkan pula sejumlah tema yang mbingkai produk dan layanan PSO Bidang Pers.

PSO Bidang Pers dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah yang ingin mempertahankan kontrol dan dominasinya terhadap kehidupan media, mengingat begitu strategisnya fungsi ekonomi-politik media. Sebuah kontradiksi pun lahir. Di satu sisi, pemerintah ingin mengadopsi prinsip-prinsip pers liberal, di sisi lain pemerintah mempertahankan kebijakan-kebijakan di sektor media yang bertentangan dengan semangat libertarianisme.

Kata kunci: manajemen produksi, pemberitaan

PENDAHULUAN

Kegiatan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional ini dapat digolongkan sebagai *non-commercial activities*. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perum LKBN ANTARA dilakukan dana pelayanan umum (*public service obligation/PSO*) di bidang informasi dari pemerintah. Tahun 2009 ini adalah tahun kedua pelaksanaan PSO Bidang Pers Perum LKBN ANTARA.

Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama untuk media sangat strategis. Sebab, LKBN ANTARA memainkan peran penting sebagai instrumen standar informasi negara yang mempunyai kredibilitas tinggi di luar negeri. Sementara, untuk lingkup domestik, banyak media massa di daerah pun menjadikan LKBN ANTARA sebagai sumber informasi nasional.

Posisi LKBN ANTARA juga sangat strategis di tengah pertarungan industri media yang sarat kepentingan. Juga, perlunya kantor berita masuk media ritel dengan strategi lini produk dengan tetap mempertahankan produk utama untuk media.

LKBN ANTARA bisa menjadi salah satu lembaga media yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan serta publik. Namun, untuk bisa bertahan, LKBN ANTARA harus terus mengembangkan kerjasama dengan media dan lembaga lain, khususnya berbasis publik melalui penyediaan jasa tertentu serta menjadi penyedia alternatif berita dari media-media yang telah ada.

PSO dilakukan karena jika tidak ada intervensi pendanaan dari pemerintah baik langsung maupun tidak langsung

maka Perum LKBN ANTARA tidak bisa dengan optimal menyesuaikan jasa layanan penyebaran informasi tersebut agar bisa diakses oleh publik.

Kewajiban pelayanan umum bidang pers yang ditugaskan kepada Perum LKBN ANTARA mencakup sejumlah produk dan layanan yaitu berita teks, berita foto, dan berita TV. Agar sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah, ditetapkan pula sejumlah tema yang membingkai produk dan layanan PSO. Tema-tema tersebut antara lain, (1) demokratisasi dan Pemilu, (2) perkembangan dan kebijakan ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi global, (3) *Millenium Development Goals* (MDGs), (4) karakter bangsa, dan (5) citra Indonesia.

Produk PSO juga diharapkan dapat diakses publik seluas-luasnya. Perum LKBN ANTARA menetapkan beberapa target penyebarluasan produk PSO 2009 yakni media cetak dan media elektronik, lembaga pemerintah, kedutaan besar negara lain yang ada di Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dengan cakupan kerja dan jejaring berskala nasional.

Proses edukasi publik dalam konteks penyebarluasan informasi oleh LKBN ANTARA hendaknya dimaknai sebagai bagian dari pemasaran yang tak terlepas dalam kerangka PSO Bidang Pers. Dalam situasi arus informasi yang sangat bebas dewasa ini, termasuk semakin kuat dan besarnya peranan swasta dalam bidang informasi, pemerintah sangat perlu untuk memberitahu publik tentang berbagai hal apa yang menjadi kebijakan, rencana, program, dan pendapat pemerintah.

Apalagi secara nyata, tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki kemampuan dan akses yang sama terhadap informasi baik karena keadaan geografis, demografis, kemampuan sosial-ekonomi maupun teknologi. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks informasi yang menjadi fokus utama pelaksanaan PSO Bidang Pers ini.

Meski ANTARA mendapatkan dana dari pemerintah sebagai kompensasi menjalankan tugas *Public Service Obligation* (PSO), namun tetap menjalankan fungsi pemberitaannya dengan memegang prinsip independensi. Selama ini ANTARA sudah baik dalam menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme itu. Namun Presiden Yudhoyono juga meminta agar Perum ANTARA mengembangkan profesionalitas dan jangkauan kemampuan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan PSO, dan mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mempengaruhi kebijakan redaksional ANTARA dan melakukan penilaian bagaimana adaptasi pola kerja dan manajemen yang digunakan untuk mengelola kerja sebagai Perum dan sebagai pelaksana PSO di bidang informasi.

KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Politik: Konsepsi ekonomi-politik media massa sangat berpengaruh dalam tradisi perkembangan studi media. Jika dikategorikan, ekonomi politik media termasuk dalam era cultural criticism berdasarkan era perkembangan media dan industri media. Secara teoretis, Vincent Mosco (1996: 5) mendefinisikan ekonomi-politik sebagai studi mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan, yang secara bersama-sama

mendasari proses produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya.

Kajian Graham Murdock dan Peter Golding lebih kental pada aspek dan struktur ekonomi (lebih ke pendekatan economism) dalam kajian ekonomi-politik media massa dibandingkan kajian pada muatan (isi) ideologis media (pendekatan reductionism). Mengenai hal ini Golding dan Murdock (2000: 70) menyatakan: "Kita mungkin perlu memahami betul proses-proses dinamis yang terjadi pada tahapan tertentu dari sebuah kapitalisme tertentu dimana sebuah media hidup untuk dapat memahami fungsi-fungsi ideologis yang dijalankan oleh suatu media massa".

Pendekatan ini melihat bahwa peran media massa melegitimasi produksi 'kesadaran semu' dalam kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media. Murdock dan Golding (1995: 204) menyatakan, tekanan untuk memaksimalkan khalayak sebagai konsumen media massa dan meningkatkan keuntungan kapital menjadi kecenderungan media untuk menghindari hal yang tidak menguntungkan dan mengambil bentuk-bentuk yang akrab dan dapat diterima masyarakat.

Analisis wacana kritis mewakili berbagai teori, metodologi, dan definisi. Meliputi konsep teoritis dari teori wacana dan teori kritis, serta menyarankan metode untuk mengungkap hubungan antara berbagai perspektif, analisis wacana kritis (disingkat CDA dalam kebanyakan konteks) adalah studi tentang teks, ucapan, dan visual yang menggambarkan untuk mengungkap makna bersama yang berkontribusi, atau mewakili, struktur sosial dan ideologi. CDA dibedakan dari analisis wacana dengan tujuan-tujuan politik dan sosial

eksplisit; mengasumsikan bahwa struktur wacana merupakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dan berusaha untuk mengekspos struktur yang baik dalam produksi dan penerimaan tertulis, lisan, dan / atau pesan visual. CDA berkaitan dengan mempelajari dan menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi diciptakan dan diabadikan melalui wacana dalam berbagai konteks politik, sosial, dan sejarah. Dengan membuka selubung kerja praktek wacana tersebut, CDA ulama berharap untuk menumbangkan-atau setidaknya menahan-praktek-praktek dalam kepentingan keadilan sosial. CDA tidak memberikan satu tunggal atau spesifik metodologi teori atau penelitian. Sebaliknya, berbagai teori dan metode penelitian telah mempengaruhi perkembangan CDA. teori epistemologis, teori-teori sosial, teori sosiopsikologis, teori wacana, dan teori-teori linguistik, untuk nama hanya segelintir, dapat ditemukan di CDA. Pada intinya, CDA membawa berbagai teori ke dalam bermain dengan berfokus baik pada aspek mikro wacana (misalnya, kata-kata, kalimat, dan gambar) dan aspek makro dari struktur sosial (misalnya, produksi dan penerimaan teks dalam rangka lebih luas ceramah). Pada tingkat mikro, CDA mengasumsikan bahwa kekuasaan memanifestasikan dalam pola penggunaan kata-kata dan gambar dan individu berpartisipasi dalam proses pembangunan ini dalam penggunaan bahasa.

Pada tingkat makro, CDA mengasumsikan bahwa identitas kami (subjektivitas) yang dibangun di dalam dan melalui cara kita memproduksi dan mengkonsumsi wacana dan bahasa yang membangun dunia sosial dan budaya kita. Dalam kedua konteks, CDA mengasumsikan bahwa sosial, budaya,

identitas, dan struktur kekuasaan tidak tetap-bahwa perubahan dalam penggunaan bahasa dapat dan mengubah itu yang dibangun oleh perubahan sosial ini adalah tujuan dari CDA. Istilah kunci dari CDA adalah wacana dan kritis. Dalam kebanyakan penggunaan yang terkait dengan CDA, wacana dibedakan dari teks, yang ucapan tertentu, gambar, atau tulisan. Wacana adalah bentuk keseluruhan pengetahuan dan arena yang delimits tertentu ekspresi.

Menurut Michel Foucault, yang karyanya mempengaruhi perkembangan CDA, penggunaan bahasa dan kata-kata diatur melalui diskursif formasi-konvensi dan aturan yang membatasi pengetahuan kita dan makna dari hal-hal. Wacana, maka, adalah arena di mana hubungan sosial, praktek, dan perilaku yang dibangun dan dipelihara. cara kerja ideologi mencirikan aspek penting dari CDA. Keprihatinan ini dapat ditelusuri dengan pekerjaan Marxis dan pengaruh ulama Frankfurt School yang berpendapat bahwa ideologi tertentu disampaikan melalui tekstual dan bentuk-bentuk budaya. Ideologi merupakan konsep penting dalam CDA karena melalui ideologi bahwa kekuasaan dan ketidaksetaraan dipertahankan. produksi tekstual dan penerimaan adalah proses sosial.

Makna teks sering dikodekan oleh mereka yang berkuasa, meskipun makna dan efek dari bahasa juga produk dari negosiasi antara produsen, konsumen, dan konteks sosial / budaya yang lebih luas. Teks, maka, dapat terbuka untuk kontestasi berbagai individu dan kelompok-produsen dan penerima-perjuangan atas makna dan efek. Peran ideologi, bagaimanapun, adalah untuk menaturalisasikan struktur dominan sehingga proses pembuatan makna dan konstruksi sosial dikaburkan. CDA

bertujuan untuk membuat proses ini terlihat dengan menanyakan apakah teks melayani kepentingan atau struktur dominasi kuat, dengan mengevaluasi apakah suatu representasi atau identitas dipilih atau dibangun dengan cara tertentu, dan dengan meminta yang menghasilkan representasi dan apa motivasi mereka mungkin.

Laporan BAPPENAS/ADB menyatakan bahwa (i) ketiadaan indikator kinerja utama sering menimbulkan kesulitan dalam melakukan penilaian manfaat dari PSO (ii) PSO dianggap sebagai 'rencana keluar' untuk mengkompensasi kerugian usaha BUMN bidang transportasi daripada memenuhi tujuan-tujuan pembangunan sosial (iii) kontrak tahunan dan waktu keputusan yang lama atau tertunda membuat ketidakfleksibelan dalam tahap operasi dan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan layanan kepada publik sejalan dengan penugasan yang ada (Allan, 2009).

LKBN ANTARA ikut mewarnai dinamika pertumbuhan pers nasional yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan kantor berita nasional adalah sebuah keniscataan dan bisa menjadi sumber berita terpercaya di tengah-tengah maraknya media asing dalam menyebar informasi yang belum tentu sesuai dengan kepentingan nasional.

Perubahan status Lembaga Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP 40/2007 tertanggal 18 Juli 2007 dimaksudkan agar memudahkan kerja kantor berita perjuangan tersebut untuk menghadapi era konvergensi media dan tantangan bisnis media yang kian mengglobal.

Dengan berbadan hukum Perum, LKBN ANTARA dapat mengembangkan berbagai lini bisnis berbasis konten,

komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan media. Sebagian berita untuk pasar media diformat untuk publik melalui portal publik www.antaranews.com.

Penelitian ini adalah kajian ekonomi politik media massa dengan paradigma ekonomi politik kritis konstruktivis. Beberapa kajian pada level makro dari studi ekonomi politik memusatkan perhatian pada dua macam pendekatan, yakni: *economism* dan *reductionism* (ideology). Pendekatan *economism* melihat bahwa praktek-praktek sosiokultural yang mempengaruhi produksi dan konsumsi teks akan berbeda-beda karena perbedaan dari persoalan-persoalan pokok di bidang ekonomi atau pengembangan modal. Masalah produksi ideology hanyalah persoalan kedua yang tidak terlalu perlu diperhatikan.

Pada bagian lainnya, *reductionism* dikaitkan dengan teori-teori Kultural Marxis yang lebih memfokuskan diri pada fungsi-fungsi ideologis yang dijalankan oleh media. Analisis- analisis mereka umumnya direduksi atau diisolasi pada level teks secara berlebihan untuk menemukan kandungan-kandungan ideologis tersebut, sehingga mengakibatkan kemungkinan hilangnya hubungan antara teks tersebut dengan kenyataan bahwa - bagaimanapun - pers adalah sebuah institusi ekonomi dalam sebuah sistem kapitalis (Murdock dan Golding, 1982: 37).

Dalam industri media, pergulatan diskursus tarik menarik antara relasi ekonomi dan relasi politik terhadap peran independensi media dalam kaitannya media sebagai sarana untuk membentuk ruang publik yang cerdas dan konstruktif sangat melelahkan. Dalam arti bahwa masing-masing relasi memiliki sistem nilai yang berlaku sekaligus mengandung

unsur kepentingan yang tak bisa dihindarkan. Pergulatan keduanya pada akhirnya akan berpengaruh secara signifikan terhadap posisi media dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Ekonomi dilihat sebagai usaha mengakumulasi modal instrumentalis bagi perolehan nilai kapital yang besar. Sedangkan politik memandang perlunya intervensi kebijakan yang mengatur kerja-kerja ekonomi media. Pada titik ekstrem ini, diperlukan usaha 'jalan tengah' yang dinilai efektif bagi keberlangsungan industri media dan juga bagi pelayanan publik secara umum.

Jalan tengah yang dimaksud adalah dengan memberikan perlindungan efektif dengan melakukan monopoli publik yang dilindungi oleh negara. Kondisi itu didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap barang umum (public goods dalam hal berupa gelombang elektromagnetik). Misalnya Keane berpendapat bahwa keberagaman komunikasi media komunikasi non-pemerintah dan penciptaan badan-badan pengaturan yang supranasional dan bertanggung-gugat secara politis dan pemberian tanggung-jawab kepada korporasi media yang besar dapat memperbaiki model pelayanan publik. Selain itu, dari sisi kepentingan publik, maka yang harus menjadi pokok perhatian bukanlah pilihan antara pengaturan oleh negara (*state regulation*) atau pengaturan oleh pasar (*market regulation*), tetapi apakah segala pengaturan tersebut mampu memperhatikan kepentingan publik secara optimal (lihat a.l. Mosco, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian : LKBN ANTARA ikut mewarnai dinamika pertumbuhan pers

nasional yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan kantor berita nasional adalah sebuah keniscataan dan bisa menjadi sumber berita terpercaya di tengah-tengah maraknya media asing dalam menyebarkan informasi yang belum tentu sesuai dengan kepentingan nasional.

Perubahan status Lembaga Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP 40/2007 tertanggal 18 Juli 2007 dimaksudkan agar memudahkan kerja kantor berita perjuangan tersebut untuk menghadapi era konvergensi media dan tantangan bisnis media yang kian mengglobal.

Dengan berbadan hukum Perum, LKBN ANTARA dapat mengembangkan berbagai lini bisnis berbasis konten, komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan media. Sebagian berita untuk pasar media diformat untuk publik melalui portal publik www.antaranews.com.

Secara nyata dalam Pembebanan PSO Bidang Pers masih dilingkupi menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, yakni: mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar bangsa di dunia.

Paradigma yang berkembang dalam penugasan itu bukanlah dari sudut komersial, sehingga hubungan antara Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Perum LKBN ANTARA adalah hubungan pemberi dan penerima penugasan. Di satu sisi, pemerintah memang mendapatkan bisa memperoleh sarana dalam penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.

Sementara di sisi lain, berbekal kompensasi dalam bentuk PSO Bidang Pers, Perum LKBN ANTARA melakukan produksi informasi sesuai dengan penugasan tersebut.

Tugas yang diberikan kepada Perum LKBN Antara berupa Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pers dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 115/KEP/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum/ *Public Service Obligation* (PSO) Bidang Pers Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 116/KEP/M.KOMINFO04/2008 tentang Penetapan Harga Produk Kewajiban Pelayanan Umum / *Public Service*

Berbagai konten produksi LKBN ANTARA menjangkau lebih dari 300 pelanggan media yang ada di Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA telah memperluas jaring kemitraan strategis, dengan melakukan kerjasama kesepahaman dengan sejumlah kampus di Indonesia. Secara khusus kerjasama ini ditujukan untuk memperkuat distribusi berita kepada kalangan pers kampus. Khusus di Kampus setiap harinya, sekitar 1.200 item berita langsung dapat diterima oleh pegiat pers kampus secara gratis dan bisa dikutip tanpa menarik biaya langganan.

Kini layanan data seketika dilakukan IMQ, salah satu unit bisnis di bawah ANTARA. Pelayanan ini berupa informasi data seketika mengenai harga valuta asing, emas dan komoditi lainnya di bursa-bursa nasional dan internasional, serta informasi dari pusat-pusat bisnis di seluruh dunia.

Meski ANTARA mendapatkan dana dari pemerintah sebagai

Obligation (PSO) Bidang Pers Tahun Anggaran 2009.

Layanan ANTARA meliputi produksi berita teks, foto dan multimedia sebagai bisnis inti. Beberapa bisnis bukan inti adalah layanan teknis dan pemasaran bekerjasama dengan Reuters, Bloomberg, AFP, Xinhua dan DPA, selain jasa pengelolaan portal berita, penerbitan, pendidikan jurnalistik, media relation dan public relation.

LKBN ANTARA telah memprakarsai pelayanan foto radio sejak bulan September 1983, dengan menggunakan pesawat pemancar berkekuatan 30 kilowatt sumbangan pemerintah Jerman Barat ketika itu. Pada Februari 1985, Antara memulai pelayanan AP-Dow Jones Telerate, terutama bagi kalangan bisnis perbankan.

kompensasi menjalankan tugas *Public Service Obligation* (PSO), namun tetap menjalankan fungsi pemberitaannya dengan memegang prinsip independensi. Selama ini ANTARA sudah baik dalam menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme itu. Namun Presiden Yudhoyono juga meminta agar Perum ANTARA mengembangkan profesionalitas dan jangkauan kemampuan.

Dalam pengelolaan manajemen berbasis Biro, LKBN ANTARA mengembangkan konsep Biro Mandiri sejak tahun 2008. Konsep ini mengharuskan Biro Mandiri minimal membiayai operasional sendiri. Jika memungkinkan, Biro Mandiri harus mengembangkan berbagai terobosan untuk meraih keuntungan dari bisnis berita.

LKBN ANTARA telah mendapat penghargaan ISO 9001:2000 dari "World Quality Assurance (WQA)". Implementasi ISO 9001:2000 ini merupakan salah satu program dari

konsolidasi sistem manajemen yang kini sedang berlangsung.

Prosedur pencairan anggaran PSO di LKBN ANTARA sangat ketat. Proses pergantian dana tersebut baru bisa dilakukan setelah kesesuaian antara isi dengan tema berita yang disepakati dan prosedur keuangan diverifikasi secara ketat oleh Depkominfo yang mengacu pada aturan Keuangan Negara yang berlaku.

Hal-hal tersebut penting untuk membantu pemerintah dalam memperkirakan besaran biaya penugasan termasuk mekanisme dan dasar pemberian kompensasinya. Salah satu isu terpenting dalam kaitan ini adalah *costing basis*. Jika diperlukan pemerintah dapat melakukan studi komprehensif dengan menggunakan jasa konsultan. Ini untuk menghindari adanya proyek yang over valued yang pada akhirnya merugikan negara.

MATRIKS 1. PENDORONG DAN KENDALA PROSES PRODUKSI

ASPEK	KENDALA	PENDORONG	STRATEGI
PELIPUTAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan jumlah reporter b. Pemahaman kriteria tema berita belum sama c. Narasumber minta "entertain" 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi dana Produksi PSO b. Ada Lembaga pelatihan jurnalistik antara c. Ada lembaga Ombudsman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen Reporter PSO b. Sosialisasi dari ombudsman c. Pelatihan berkala
PRODUK	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita terlalu pendek b. Kurang kritis c. Kurang angkat potensi lokal d. Belum ada konten audio 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan pemda setempat b. Kerjasama langganan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu Assesment kebutuhan lokal b. para pelanggan untuk penyempurnaan konten
DISTRIBUSI	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecepatan penyebaran/penayangan b. Foto sering terlambat c. News Portal lokal belum terintegrasi d. Keamanan password VSAT/Portal e. Pengutipan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan news portal lokal b. Pengembangan news potral nasional c. Kerjasama dengan stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi newportal lokal untuk support konten lokal b. Kembangkan sinergi untuk percepatan penyebaran konten

	media lokal tanpa sebutkan sumber		
--	-----------------------------------------	--	--

LKBN ANTARA telah mendapat penghargaan ISO 9001:2000 dari "World Quality Assurance (WQA)". Implementasi ISO 9001:2000 ini merupakan salah satu program dari konsolidasi sistem manajemen yang kini sedang berlangsung.

Prosedur pencairan anggaran PSO di LKBN ANTARA sangat ketat. Proses pergantian dana tersebut baru bisa dilakukan setelah kesesuaian antara isi dengan tema berita yang disepakati dan prosedur keuangan diverifikasi secara ketat oleh Depkominfo yang mengacu pada aturan Keuangan Negara yang berlaku.

Hal-hal tersebut penting untuk membantu pemerintah dalam memperkirakan besaran biaya penugasan termasuk mekanisme dan dasar pemberian kompensasinya. Salah satu isu terpenting dalam kaitan ini adalah *costing basis*. Jika diperlukan pemerintah dapat melakukan studi komprehensif dengan menggunakan jasa konsultan. Ini untuk menghindari adanya proyek yang over valued yang pada akhirnya merugikan negara.

Pembahasan: Kegiatan penyebarluasan informasi pada dasarnya dapat dimaknai dalam tiga tujuan dasar, yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan publik, (2) meningkatkan kualitas pemahaman, dan (3). mengembangkan kepedulian/partisipasi publik berkaitan dengan informasi yang disebarluaskan.

Dalam situasi arus informasi yang sangat bebas dewasa ini, termasuk semakin kuat dan besarnya peranan swasta dalam bidang informasi, pemerintah sangat perlu untuk memberitahu publik tentang berbagai hal

apa yang menjadi kebijakan, rencana, program, dan pendapat pemerintah. Apalagi secara nyata, tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki kemampuan dan akses yang sama terhadap informasi baik karena keadaan geografis, demografis, kemampuan sosial-ekonomi maupun teknologi. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks informasi yang menjadi fokus utama pelaksanaan PSO Bidang Pers ini.

Bisnis informasi, khususnya multimedia semakin ketat. Masa depan informasi akan dikuasai oleh mereka yang mengelola konten, khususnya elektronik. Jenis dan sifat informasi juga akan lebih tersegmentasi. Bahkan konsep broadcast (sistem pancarluas) akan menjadi multicasting (dari satu sumber ke berbagai jenis saluran penerima atau multimedia).

Kemajuan teknologi memungkinkan semua itu. Stasiun TV di tanah air juga sudah mulai menawarkan produk-produk yang mereka siarkan melalui website sehingga bisa diakses oleh internet dan telepon genggam secara selektif. Singkat kata, kelak, tidak ada bagian dari bumi pertiwi ini yang tidak dapat dijangkau oleh informasi elektronik.

Lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah memiliki beragam cara dan metode untuk mengomunikasikan program dan citra lembaganya kepada publik dan masyarakat luas. Jika memang dalam kebijakan PSO Bidang Pers disebutkan adanya keinginan untuk meningkatkan peran serta masyarakat maka perlu dikembangkan upaya untuk mengedukasi publik.

Proses edukasi publik dalam konteks penyebarluasan informasi oleh

LKBN ANTARA hendaknya dimaknai sebagai bagian dari pemasaran yang tak terlepas dalam kerangka PSO Bidang Pers.

Penyampaian informasi dalam kerangka pemasaran program pemerintah atau best practices kemasyarakatan, apalagi kepada publik yang relatif beragam, bukanlah hal yang mudah. Ibarat gunung es, begitu banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan strategi dan cara pendekatan khusus guna penyempurnaan pelaksanaan PSO Bidang Pers di masa mendatang.

Dalam penyaluran PSO Bidang Pers terdapat beberapa kendala umum. Paling tidak ada tiga permasalahan yang sering dikeluhkan oleh BUMN-BUMN yang mendapat penugasan PSO. Pertama, subsidi PSO tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menutup kerugian menjalankan penugasan PSO. Hal ini karena besarnya subsidi PSO yang diberikan oleh Pemerintah tergantung kepada kemampuan keuangan negara.

Permasalahan yang kedua adalah pencairan subsidi PSO yang dilakukan di belakang. Karena pihak pemerintah harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran/penggantian biaya atas tugas pelayanan umum yang telah dilakukan oleh BUMN sehingga berdampak pada terganggunya arus kas BUMN. Permasalahan yang ketiga adalah pemanfaatan dana PSO sering kurang tepat sasaran.

Masalah ini adalah masalah paling mendasar dalam pelaksanaan PSO Bidang Pers Perum LKBN ANTARA adalah penetapan aktivitas PSO. Persoalan yang muncul berkaitan dengan hal ini antara lain estimasi nilai PSO, penetapan tema atau ruang lingkup penugasan beserta kualifikasi dan spesifikasi-spesifikasi yang jelas dan terukur.

Kesemua hal tersebut penting ditetapkan untuk membantu pemerintah dalam memperkirakan besaran biaya penugasan termasuk mekanisme dan dasar pemberian kompensasinya. Salah satu isu terpenting dalam kaitan ini adalah *costing basis*. Memang salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melakukan studi komprehensif dengan menggunakan jasa konsultan, untuk menghindari adanya *over valued* yang bisa merugikan negara.

Efisiensi dan transparansi adalah pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang menggunakan dana publik. Tuntutan publik akan kinerja ANTARA sebesar dana yang dikucurkan pemerintah melalui skema public service obligation (PSO). Oleh karena itu adalah sebuah keniscayaan jika ada bagian lain dari Antara yang bisa diakses publik secara mudah. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada mekanisme yang baik terhadap pelaksanaan penggunaan dana PSO.

Kajian Graham Murdock dan Peter Golding lebih kental pada aspek dan struktur ekonomi (lebih ke pendekatan economism) dalam kajian ekonomi-politik media massa dibandingkan kajian pada muatan (isi) ideologis media (pendekatan reductionism).

Wacana Analisis Kritis mewakili perbedaan teori, metodologi, dan jelasnya meliputi konsep teoritis dari Teori Wacana Dan Kritis Teori, serta menyarankan metode untuk review mengungkap hubungan antara perbedaan perspektif, analisis wacana Kritis (disingkat CDA dalam berbagai Konteks). Teks adalah studi tentang, ucapan, dan visual yang menggambarkan untuk menganalisis atau review mengungkap makna bersama yang berkontribusi, atau mewakili, struktur sosial dan ideologi. CDA dibedakan dari analisis wacana dengan tujuan-tujuan

politik dan sosial eksplisit; mengasumsikan bahwa struktur wacana merupakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dan berusaha untuk review mengekspos struktur yang baik produksi dan penerimaan tertulis, lisan, dan / atau pesan visual. CDA berkaitan dengan mempelajari dan menganalisis bagaimana hubungan Kekuasaan, ketimpangan, dan Dominasi diciptakan dan diabadikan pemikiran wacana karena perbedaan konteks politik, sosial, dan sejarah.

Pendekatan ini melihat bahwa peran media massa melegitimasi produksi 'kesadaran semu' dalam kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media. Murdock dan Golding menyatakan, tekanan untuk memaksimalkan khalayak sebagai konsumen media massa dan meningkatkan keuntungan kapital menjadi kecenderungan media untuk menghindari hal yang tidak menguntungkan dan mengambil bentuk-bentuk yang akrab dan dapat diterima masyarakat.

Masih menurut Golding dan Murdock, perkembangan industrialisasi komunikasi massa yang ditandai dengan adanya teknologi modern telah mempercepat proses produksi dan industri media. Mereka berdua mengklasifikasikan ke dalam tiga bentuk konsentrasi utama (Integrasi, Diversifikasi, Internasionalisasi).

Pertama, Integrasi. Baik integrasi horizontal maupun vertikal lebih mengutamakan pada akumulasi modal dan kepemilikan bagi keberlangsungan sebuah industri media. Tipe yang sering dipergunakan dalam proses integrasi perusahaan adalah model merger (penyatuan dua perusahaan atau lebih dalam satu wadah besar) dan *take-over* (pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain). Misalnya proses akuisisi koran harian *The Times* dan *The*

Sunday Times oleh Thomson Organization. Atau take over Penguin Books (buku bersampul tipis yang beraset terbesar di dunia) yang diambil alih oleh Person Longmans (satu dari penerbitan terbesar di Inggris). Bisa juga dilihat pada tahun 1970, ketika surat kabar terkemuka di Inggris dan penerbit majalah IPC melakukan merger dengan Reed Group Limited, sebuah korporasi internasional di bidang industri kayu, bahan kayu, dan media cetak. Proses integrasi ini melahirkan terjadinya kepemilikan modal silang di dalam industri media yang pada akhirnya melakukan kontrol kuat terhadap muatan-muatan media sebagaimana ditemukan dalam produksi dan pemberitaan LKBN ANTARA.

Kedua, Diversifikasi. Diversifikasi antara modal dan kerja pada industri media dilihat sebagai satu mekanisme dari proses penganekaragaman usaha ekonomi modal dalam industri media yang dilakukan oleh perusahaan media atau oleh pemilik modal. Diversifikasi industri media ini hampir memiliki kemiripan dengan proses integrasi industri media. Dimana pembentukannya akibat dari keinginan untuk melakukan proses 'survival' dan melindungi diri akibat dari kondisi ekonomi dan permodalan yang sedang tidak menguntungkan. Biasanya terjadi pada perusahaan media yang memiliki orientasi ekonomi yang sama atau juga akibat dari jatuhnya nilai aset permodalan sehingga harus dilakukan proses diversifikasi dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan modal.

Dan *ketiga*, internasionalisasi dan ekspansi produktivitas terjadi ketika industrialisasi media mencapai tahap perkembangan maju yang didukung oleh perputaran modal besar, kerja-kerja produktivitas, dan oleh teknologi modern yang super mekanistik. Ketika itu pula hasrat ekonomi-kapitalistik industri

media bergerak pada skala jaringan internasional. Proyek internasionalisasi ini bisa dilakukan dengan melakukan ekspor terhadap produksi media ke jaringan internasional atau negara-negara lain. Struktur dan peranan media masa di negara dunia ketiga menurut Golding perlu difahami dikaitkan dengan konteks internasional ketergantungan negara itu. Selama ini ada dua pendekatan yang dipakai untuk memahami peranan media massa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan : Penugasan khusus kepada Perum LKBN ANTARA untuk mendiseminasikan informasi yang dapat mendidik dan mencerdaskan masyarakat guna peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007. Perum LKBN ANTARA diharapkan mampu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui jaringan yang telah ada dan menjadi pionir dalam setiap upaya mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan publik melalui produk informasi dan jaringan aksesibilitas yang bisa digunakan oleh publik.

Kewajiban pelayanan umum bidang pers (PSO-Bidang Pers) tersebut mencakup sejumlah produk dan layanan yaitu berita teks, berita foto, dan berita TV. Agar sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah, ditetapkan pula sejumlah tema yang membingkai produk dan layanan PSO Bidang Pers. Tema-tema tersebut antara lain, (1) demokratisasi dan Pemilu, (2) perkembangan dan kebijakan ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi global, (3) *Millenium Development Goals* (MDGs), (4) karakter bangsa, dan (5) citra Indonesia.

PSO dimaksudkan untuk mengenalkan mekanisme pasar dan mengembangkan profesionalisme antara

pemerintah sebagai purchaser dan korporasi sebagai provider. Kejelasan dan kedisiplinan komitmen dapat diwujudkan antara lain dengan kejelasan kontrak antara kedua belah pihak.

Kontrak semestinya mengatur secara jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlu dimasukkan dalam kontrak adalah kualifikasi dan spesifikasi-spesifikasi yang jelas dan terukur, seperti batasan wilayah penugasan, estimasi jumlah pengguna, hingga hal-hal yang sifatnya kualitatif seperti tingkat kenyamanan dan lain sebagainya.

Satu isu pokok yang juga penting adalah masalah pembayaran atas penugasan PSO. BUMN sebagai pihak pelaksana PSO sering mengeluhkan adanya terlambatnya pelunasan atas kewajiban pemerintah atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak BUMN. Mestinya terhadap keterlambatan tersebut Pemerintah diwajibkan membayar denda atau bunga. Mengingat bagi beberapa BUMN jumlah yang diklaim adalah sangat signifikan yang sangat mengganggu likuiditas perusahaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dapat dikatakan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan PSO Bidang Pers di tahun 2009 ini. Aspek-aspek utama yang berkaitan dengan pelaksanaan PSO, yaitu, produksi berita sesuai dengan tema yang dipersyaratkan oleh pemerintah telah dapat dilakukan dengan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara proses verifikasi juga bisa berlangsung dengan baik karena adanya acuan awal yang telah disepakati bersama.

Secara umum kualitas produk informasi yang dihasilkan dalam PSO Bidang Pers dapat dikatakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKBN ANTARA. Namun demikian ada beberapa catatan yang diberikan oleh

pengguna informasi produk PSO dan bisa dikembangkan sebagai acuan dalam proses produksi PSO Bidang Pers di tahun-tahun berikutnya. Secara teknis ada beberapa masukan yang diberikan yakni persoalan ketepatan waktu, kelengkapan, dan akses yang masih sulit (untuk berita teks dan foto). Sementara ada pula soal tema, durasi dan pilihan media penyebaran yang menjadi masukan untuk proses produksi konten televisi.

Dan PSO Bidang Pers dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah yang ingin mempertahankan kontrol dan dominasinya terhadap kehidupan media, mengingat begitu strategisnya fungsi ekonomi-politik media. Sebuah kontradiksi pun lahir. Di satu sisi, pemerintah ingin mengadopsi prinsip-prinsip pers liberal, di sisi lain pemerintah mempertahankan kebijakan-kebijakan di sektor media yang bertentangan dengan semangat libertarianisme.

Saran: Berdasarkan pokok-pokok temuan sebagaimana dikemukakan di atas, berikut adalah rekomendasi bagi upaya peningkatan kuantitas dan kualitas PSO Bidang Pers di masa mendatang: (1). Untuk dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan pemahaman lebih terhadap konten informasi PSO Bidang Pers, maka LKBN ANTARA harus mengembangkan strategi komprehensif. Strategi yang dimaksud merupakan perpaduan dari optimasi perangkat-perangkat pendukung, teknologi yang digunakan, dan sumber daya manusia yang bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan baik. Sementara untuk mencapai cakupan khalayak atau publik yang lebih luas dan beragam latar belakang, tentunya secara bertahap perlu dipersiapkan saluran-saluran informasi yang mendukung peningkatan kualitas penyebaran informasi. (2). Salah satu

elemen keberhasilan penyebarluasan informasi konten PSO Bidang Pers adalah terciptanya jaringan komunikasi dan kerjasama antar LKBN ANTARA dengan lembaga pemerintahan, swasta dan komunitas. Dalam upaya mengembangkan kualitas kinerja, semua elemen harus bisa digerakkan. Dari segi manajemen pengelolaan, pelayanan, penyebaran, pengemasan konten informasi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik. Selain itu juga perlu dipertimbangkan pelatihan sumber daya manusia dalam konteks lembaga komunitas agar dapat menumbuhkan kebutuhan mengosumsi dan mengelola informasi. (3). Penting kiranya untuk melibatkan publik untuk ikut menentukan informasi apa yang ingin diambil dan digunakan. Negosiasi antara ketersediaan informasi yang dikemas dalam PSO Bidang Pers ini diperlukan agar pemanfaatan informasi bisa sesuai dengan tujuan PSO Bidang Pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Hancock College. 2009. *BRIEFS POLICY Pelaksanaan PSO di Indonesia* diakses dari <http://www.coursehero.com/file/4808042/blackbriefin/>
- Bagdikian, B. 1997. *The Media Monopoly*. Boston: Beacon
- Bin Nahadi. 2007. *Komersialisasi Public Service Obligation (PSO)*. Dalam *Bisnis Indonesia*, Selasa, 17 April 2007.
- Bogdan, Taylor dan Biklen, R. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Teori dan Praktek di Lapangan*. Jakarta: Pusat

- Antar Universitas -
Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan, 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Cipta Adi Pustaka, 1988. *Ensiklopedia Nasional Indonesia* Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2007. *Public Service Obligation (PSO)*. Diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193>
- Gazali, Effendi. 2002. *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik & Komunitas*. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- James Curran, and Michael Gurevitch, 1992. *Mass Media and Society*. London, New York: Edward Arnold.
- John M. Owen, 2003, *Program Evaluation, Form and Approaches*, National Library of Australia.
- Jurgen Habermas. 1993. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge MA: MIT Press
- McNair, Brian. 1999. *Politics, Demoocracy and the Media, in An Introduction to Political Communication, Second edition*. London: Routledge.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*, New York: Sage Publication, 1996. <http://www.globalmediajournal.com/open-access/the-political-economy-of-communication-power-and-resistance-an-interview-with-vincent-mosco.pdf>
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Ruben, Brent D. 1992. *Communication and Human Behaviour*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- d'Haenens, Leen, Effendi Gazali, and Chantal Verelst. 2001. "Indonesian Television News Making Before and After Soeharto". *Gazette*. 61 (2): 2001, p.127-52.
- Edelstein, Alex, and Otto Larsen. 1960. "The Weekly Press Contribution to a Sense of Urban Community", *Journalism Quarterly*. 65. <http://www.jbmethods.org/jbm/article/view/36/28>
- Golding, Peter dan Graham Murdock. 2008. *Culture, Communications and Political Economy in James Curran dan Michael Gurevitch (eds), Mass Media and Society*, London: Arnold.

- Keane, John. 1995. "Democracy and Media: Without Foundation in Oliver Boyd". dalam Barrett and Chris Newbold (eds), *Approaches to Media*, Arnold, 1995 hlm 265. <http://www.waterfordcouncil.ie/en/media/RESIDENT/Archives/PDFs/Sir%20J%20%20Keane%20Box%20description%20final.pdf>
- Murdock, Graham dan Peter Golding. 2012. "Capitalism, Communication and Class Relation", dalam *Mass Communication and Society*, London: Edward Arnold. [https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/gen125/um/Zoonen-Feminist Perspectives on the Media.pdf](https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/gen125/um/Zoonen-Feminist%20Perspectives%20on%20the%20Media.pdf)
- Suprawoto. 2008. "Mainkan Peran (Me)Literasi(kan) Bencana". Makalah dalam Diskusi Mengembangkan Peran Media dalam Penanganan Bencana. Jakarta: BNPB.
- Allan Hancock College. 2009. *BRIEFS POLICY Pelaksanaan PSO di Indonesia* diakses dari <http://www.coursehero.com/file/4808042/blackbriefin/>
- Bin Nahadi. 2007. *Komersialisasi Public Service Obligation (PSO)*. Dalam *Bisnis Indonesia*, Selasa, 17 April 2007.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2007. *Public Service Obligation (PSO)*. Diakses dari <http://www.anggaran.depkeu>.